**PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN EKSPEDISI
DALAM PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Angga Alfian¹, Aprinisa², Okta Ainita³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. No 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Email :

Angga.alfian@ubl.ac.id; aprinisa@ubl.ac.id; okta.anita@ubl.ac.id

ABSTRAK

Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi, sering terjadi suatu keadaan yang menyebabkan barang-barang yang diantarkan tidak sampai di tangan pembeli ataupun barang yang dikirimkan rusak. Pada penelitian ini akan dibahas peran pemerintah dalam pengawasan pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi terhadap barang pengiriman dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: . 1. Peran pemerintah dalam usaha penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab Menteri dan/atau menteri teknis terkait sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 2. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi mempunyai dua bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya (*Employment Tort*). Selain itu jalan yang dapat dilakukan adalah melakukan upaya hukum terhadap perusahaan ekspedisi tersebut sebagai berikut: Melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi

Kata kunci: Perlindungan hukum, pengiriman barang, perusahaan ekspedisi.

ABSTRACT

Process of shipping good carried by the shipping company, there is often a situation that causes the goods delivered are not in the hand of the buyer of the goods send are damaged. This research will discuss the role of government in the supervision of the responsibility of shipping companies and the legal remedies that can be done by consumers who suffer losses due delivery of goods by shipping companies. Using juridical research methods normative, the researcher concluded : 1 The role of the government in the effort to conduct supervision consumer protection is the responsibility of the Minister and / or the relevant technical minister accordingly with PP No 58 of 2001 concerning Development and Supervision of Implementation Consumer Protection. 2, The responsibility of the freight forwarder or shipping company has two forms of responsibility, that is : First is responsible for the goods lost or stolen and compensate the damage suffered by the owner. Second, item responsible for the illegal actions carried out by workers (Employment Tort). In addition, the way that can be done is to

take legal action against the expedition company as follows: Conducting a civil suit illegal acts or defaults.

Key words : Legal protection, freight forwarding, shipping company.

I PENDAHULUAN

Jasa pengiriman barang menjadi satu layanan yang sangat dibutuhkan, terlebih di jaman yang serba canggih ini. Manusia akan selalu mencari kemudahan-kemudahan karena era globalisasi dengan perkembangan teknologinya cenderung membuat mereka menyukai hal-hal yang serba instan. Jasa pengiriman barang dapat menjadi solusi bagi mereka yang menyukai kemudahan dan kepraktisan dalam hal mengirimkan suatu barang terlebih jika itu menyangkut keterjangkauan wilayah. Jasa pengiriman barang akan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ke tempat dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari suatu daerah ke daerah lain yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting bagi masyarakat. (Parhusip, Putro & Setiawan, Jurnal Online Mahasiswa, Vol. I (No. 1) September 2017).

Contoh kasus : Mamat mendapat pesanan 2 barang dari pelanggan Mamat yang berdomisili di Makassar. Kemudian Mamat mengirimkan pesanan memakai layanan JNE YES (Jalur Nugraha Ekakurir Yakin Esok Sampai). Karena biasanya JNE YES itu cepat jadi Mamat pikir besok juga langsung

keterima. Tetap anehnya saat admin baru Mamat, Rafa melacak semua tracking number hanya ada satu yang belum sampai, yaitu paketan yang dikirim ke Makassar ini. Mamat mengira bahwa rumah yang dituju sedang kosong jadi akan dilanjutkan lagi besok. Namun sampai seminggu kemudian, paketan JNE YES yang harusnya 1 hari itu ternyata belum diterima oleh pembeli.

Karena Mamat merasa ada yang tidak beres, akhirnya Mamat menanyakan kepada pembeli apakah barang sudah sampai. Pembeli jawab, belum diterima. Mamat pun meminta kerjasama pembeli untuk mengambil barang ke JNE Perwakilan setempat dan menelpon ke Call Center JNE (021) 2927 888 jika tidak tahu kemana harus mengambil barang. Keesokan harinya, pembeli mengirim pesan yang berisi bahwa barang yang dikirim hilang.

Entah kenapa Mamat tidak terkejut mengetahui barangnya hilang. Sebagai penjual sekaligus pengirim, Mamat menolak untuk mengirim barang baru karena kehilangan barang di ekspedisi bukan kesalahan pengirim. Mamat tidak mau mengirim barang lagi karena dari pihak JNE-nya saja belum ada kejelasan, apakah barang yang hilang itu akan diganti atau tidak.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen dan/atau penyedia jasa. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan/atau penyedia jasa dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen dan/atau penyedia jasa.

Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen. Peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen antara lain PP No. 58 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”(Miru, Ahmad. 2013)

Melihat pada apa yang diatur oleh PP No. 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen di atas, diharapkan bahwa masyarakat pengguna jasa pengiriman barang sebagai konsumen mendapatkan

perlindungan yang baik, karena masyarakat pengguna jasa pengiriman barang sebagai konsumen dan Perusahaan Ekspedisi sebagai pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen.

Penelitian ini penulis merumuskan masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap perusahaan ekspedisi?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan ekspedisi terhadap barang pengiriman?

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, artinya pembahasan terhadap masalah yang ada, peneliti akan melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul skripsi yaitu PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHPdata, KUHDagang dan KUHPidana.

II PEMBAHASAN

Peran pemerintah dalam usaha pengasawan terhadap perusahaan ekspedisi

Berdasarkan pada PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, maka peran pemerintah dalam pengawasan dan juga pembinaan terhadap perusahaan ekspedisi dapat dilihat pada penerapan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Pada pasal 3 PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pada pasal 3 angka 1 menyatakan bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan atau menteri terkait, yang meliputi:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
- b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen

Apabila terjadi suatu kelalaian atau ketidaktahuan pihak perusahaan ekspedisi

terhadap hak dan tanggung jawab dari perusahaan ekspedisi maka Menteri dan atau menteri terkait yang bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing sesuai dengan pasal 3 angka 2.

Pasal 7 PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pasal ini membahas peran pemerintah dalam pengawasan terhadap perlindungan konsumen. Pada pasal ini menyebutkan bahwa “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat”.

Pasal tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga perlindungan swadaya masyarakat. Sehingga dan penerapannya pemerintah tidak bekerja sendiri dalam mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pasal 8 PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen membahas pengawasan yang dilakukan pemerintah, sebagai berikut:

- a. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dan

memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa

- b. Pengawasan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dilakukan dalam proses produksi, penwaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa
- c. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dapat disebarluaskan kepada masyarakat
- d. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dan huruf (a) ditetapkan oleh menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Terhadap Barang Pengiriman

Peraturan perundang-undangan sudah di atur beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan pengangkutan dalam menjalankan usahanya, demikian juga halnya dengan perusahaan ekspedisi dimana ketentuan ini berlaku juga. Namun ternyata jika dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau juga terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi maka perusahaan harus bertanggung jawab.

Tanggung jawab sepenuhnya adalah dari pihak perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi. Dasar timbulnya tanggung jawab pelaku usaha Perusahaan Jasa Pengiriman Barang (Ekspeditur) atas kerugian konsumen yang menyebutkan, setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha hendaknya selalu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen mengingat perangkat hukum yang ada telah cukup lengkap untuk melindungi hak-hak konsumen namun hal ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan kewajiban pelaku usaha. Berkaitan dengan hal diatas dalam realitanya hak-hak konsumen sering terabaikan oleh karena suatu perbuatan pelaku usaha yang tidak mengindahkan kewajibannya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa peraturan perundang-undangan mengatur beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan pengangkutan dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Apabila dalam melaksanakan kewajibannya itu terjadi pelanggaran maka tentu saja tanggung jawab sepenuhnya menjadi milik pihak Perusahaan

Pengangkut, berikut beberapa tanggung jawab yang dimaksud :

- a. Bertanggung jawab atas barang yang hilang/dicuri dan memberikan ganti kerugian yang dederita pemilik barang
Jika Barang yang diangkut hilang/dicuri atau mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledoran Perusahaan Pengangkut maka ia harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Adapun posisi pengangkut di sini terkait dengan terjadinya hilangnya barang karena lalai atau kuranghati-hatian Pengangkut dalam memverifikasi identitas asli sang sopir , terbukti dengan fakta di lapangan bahwa KTP, SIM dan SKCK milik sang Supir adalah palsu, disamping itu Pengangkut gagal memonitorisasi dan melakukan pengawasan terhadap kinerja sang sopir yang menyebabkan hilangnya barang.

Tindakan ini berampak kerugian kepada Pemilik Barang sehingga Pengangkut wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1366 KUHPdata yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatiannya”

Perihal ganti kerugian atas barang yang hilang tersebut diperjelas dalam

Pasal 193 UU No.22 Tahun 2009 bersangkutan yang berbunyi:

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.”

Adapun yang menjadi peringatan bagi Perusahaan Jasa Pengangkut Barang untuk mengindari ganti kerugian ini tentunya jika mereka dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya barang yang diangkut tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah/dihindari (overmacht) atau kesalahan pengirim.

Contoh kasus : melanjutkan dari kasus Mamat yang kehilangan barang yang akan dikirim melalui JNE YES Tasikmalaya cabang Tamansari, Mamatmengkomunikasikan mengenai kasus barang hilang di Makassar itu kepada pihak JNE Tasikmalaya cabang Tamansari. Setelah 14 hari kerja terhitung dari sejak JNE Pusat menghubungi Mamat, akhirnya Mamat mendapat kabar dari pembeli bahwa pihak JNE akan mengganti rugi sejumlah 50 dari seluruh total biaya kerugian.

UU No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan kepada Pengirim selaku pemilik barang jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kewajiban Perusahaan Jasa Pengangkutan, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”

Dan pemberian ganti kerugian berdasarkan peraturan tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana.

b. Bertanggung Jawab Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Sopir/Pekerjanya (*Employment Tort*)

Perusahaan Pengangkut juga harus bertanggung jawab atas perbuatan sopir yang dipekerjakannya. Pasal 1367 KUHPdata adalah landasan utama bagi pertanggungjawaban tersebut, dimana seorang majikan (*employer*) bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya (*employer*) sejauh hal tersebut terjadi

dalam konteks pekerjaan. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

Adapun mengenai pertanggung jawaban suatu perusahaan jasa pengangkutan barang terhadap perbuatan pekerjanya diperkuat kembali dalam Pasal 191 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan yang berbunyi:

“Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Perusahaan ekspedisi tidak memberikan pertanggung jawaban terhadap kerugian yang diterima konsumen atas hilang/rusaknya barang yang akan dikirim, oleh karena itu pemilik barang dapat melakukan gugatan keperdataan atas hilangnya barang miliknya terkait penyelenggaraan pengangkutan barang yang dilakukan oleh suatu perusahaan ekspedisi/jasa pengangkutan barang. Dimana gugatan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian:

a. Gugatan Atas Dasar Wanprestasi

Gugatan terkait dengan wanprestasi mempunyai dasar adanya suatu pelanggaran terhadap perjanjian pengangkutan antara Pemilik Barang (Pengirim) dengan Perusahaan Jasa Pengangkutan.

Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka dinyatakan telah wanprestasi, artinya “tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. (R. Subeki. 1975, hal. 20)

Perusahaan Pengangkutan melakukan wanprestasi, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, mengangkut dan mengirimkan barang yang menjadi tanggungannya tetapi tidak sampai ke tempat tujuannya. Maka, Perusahaan Pengangkutan tersebut diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 1239 KUH Perdata bahwa

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi, bunga”.

Kapan untuk memberikan gugatan ganti kerugian tersebut, dasar wanprestasi mengacu pada ketentuan pasal 1243 KUH Perdata bahwa

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

b. Gugatan Keperdataan Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa Jika Pekerja suatu Perusahaan Pengangkutan melakukan perbuatan melawan hukum maka Pasal 1367 KUHPerdata adalah landasan utama bagi Pemilik barang untuk melakukan gugatan atas dasar Perbuatan melawan hukum Adapun pertanggungjawaban perbuatan tersebut, dimana seorang majikan (*employer*) bertanggung jawab secara tidak langsung

terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya (employee) sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan. Adapun buyi ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara yang mendukung klaim tersebut adalah sebagai berikut:

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.....”

c. Pelaporan Pidana Atas Tindakan Penggelapan

Melihat kronologis terhadap peristiwa yang terjadi maka patut diduga bahwa perbuatan si Sopir (yang merupakan pekerja Perusahaan Pengangkut) merupakan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hubungan Kerja. Dan telah memenuhi unsur Pasal 374 KUH Pidana yaitu Penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja, yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Berdasarkan pasal tersebut unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja ini adalah:

1. Dikuasainya barang karena adanya hubungan kerja;
2. Mendapat upah atas hubungan tersebut
3. Hubungan kerja tersebut merupakan pencaharian salah satu pihak

Maka berdasarkan Pasal 374 KUH Pidana ini, Pemilik barang dapat melaporkan tindakan pidana atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Perusahaan Pengangkutan yang bersangkutan.

III PENUTUP

Peran pemerintah dalam usaha penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab Menteri dan/atau menteri teknis terkait sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah adalah terhadap pelaku usaha dan memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa. Pengawasan yang dilakukan ini harus dilakukan dengan cara penelitian, pengujian maupun survey langsung yang kemudian hasilnya harus disebarluaskan kepada masyarakat.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi mempunyai dua bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya (*Employment Tort*). Selain itu jika pihak perusahaan ekspedisi tidak mau memberikan pertanggung jawaban atas hilang/rusakanya barang yang akan dikirim maka pihak konsumen (pemilik barang), maka pihak pemilik barang berhak melaporkan perusahaan ekspedisi dalam jalur hukum.

Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

Pemerintah harus gencar dalam mengawasi perusahaan ekspedisi maupun perusahaan pengangkutan

Pemerintah harus membuka sarana penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukan agar masyarakat luas dan memilih perusahaan terbaik dan terpercaya

Tanggung jawab Perusahaan Pengangkutan atau Perusahaan ekspedisi terhadap konsumen harus benar-benar diterapkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Sehingga konsumen tidak akan dirugikan.

Apabila perusahaan pengangkutan tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap

konsumen berupa pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa maka perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi tersebut harus digugat ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fauzia, Liza. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT. PLN (Persero)*
- Fuady, Munir. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Wilayah Sumatera Utara. Medan,
- Hadjon. Philips. M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- Hamzah, Achmad. 2012. Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika: Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.
- Miru, Ahmad. 2013. *Hukum Perikatan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Gramedia: Jakarta.
- Miru, Achmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*

di Indonesia, RajaGrafindo Persda, Jakarta.

R. Subekti, *Pokok-pokok dari HukumPerdata cet. XI. 1975, hal. 20..* Intermasa :Jakarta.

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*halaman 51-52 18 *Ibid., halaman 50.* Jakarta: Grasindo

Sutarmanyodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Sumber Lain

Jurnal

Nangin, Chikie. 2017. *Perlindungan Hukum TerhadapKonsumen Yang Mengalami KerugianAkibat Pengiriman Barang OlehPerusahaan Ekpeditasi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999*

TentangPerlindungan Konsumen. Vol. VI/No. 4/Juni.

Yudikindra, widyananda. Dan badriah, siti m.

2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Bagi Jasa Pengiriman Paket*

Barang Domestik Atas Tindakan

Konsumen Yang Bertikad Tidak Baik (

Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero)

Yogyakarta).

Makalah

Mahda. 2014. *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Hilangnya Dokumen.*